



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 71 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN  
STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PENUH TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja RSUD Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja RSUD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja RSUD Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja RSUD tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja RSUD Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA RSUD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RSUD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD

BAB V : PENUTUP

(2) Renja RSUD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja RSUD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA RSUD Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 71**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT  
DENGAN STATUS POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PENUH  
TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan adalah diperolehnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai tingkat dan sasaran baik untuk memenuhi sasaran jangka panjang, menengah maupun untuk jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah yang dilakukan melalui pembangunan Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman, maka disusunlah Rencana Kerja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT  
DENGAN STATUS POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PENUH  
TAHUN 2022**

sumber daya yang tersedia, adapun tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) yaitu :

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Rencana Kerja Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, penjabaran tahunan dari Rencana Strategis yang memuat prioritas pembangunan daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet (RSUD) sebagai salah satu lembaga yang mempunyai fungsi pelayanan di Kabupaten Garut. RSUD dr.Slamet Garut bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut. Pembangunan kesehatan di masa mendatang pun akan menghadapi berbagai tantangan sebagai kelanjutan dari masalah masa lalu, persoalan saat ini maupun masa depan yang akan muncul.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Awal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2022 :

Penyusunan Renstra RSUD dr. Slamet Garut berpedoman pada berbagai aturan hukum sebagai berikut :

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT  
DENGAN STATUS POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PENUH  
TAHUN 2022**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT  
DENGAN STATUS POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PENUH  
TAHUN 2022**

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Awal Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri nomer 050-3078 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT  
DENGAN STATUS POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PENUH  
TAHUN 2022**

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031;

25. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Tahun 2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi Rumah Sakit dalam mewujudkan visi dan misi Bupati yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menetapkan program dan kegiatan pembangunan daerah jangka pendek.
2. Menetapkan pedoman penyusunan dan perencanaan penganggaran.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Rumah Sakit yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **Bab I      Pendahuluan**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **Bab II     Hasil Evalausi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut Tahun Lalu.**

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis RSUD dr. Slamet Garut; Analisis Kinerja Pelayanan RSUD

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT  
DENGAN STATUS POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PENUH  
TAHUN 2022**

dr. Slamet Garut, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Slamet Garut; Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**Bab III Tujuan dan Sasaran**

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD dr. Slamet, Program dan Kegiatan

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Slamet Garut**

Memuat Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Pendanaan RSUD dr. Slamet Garut

**Bab V Penutup**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD dr. SLAMET**  
**TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Tahun 2021**

Untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Serta Visi Misi RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2021, diimplementasikan melalui 2 program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021**  
**RSUD dr. Slamet Garut**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02				Urusan Pemerintahan : Kesehatan									
					Bidang Urusan :Wajib									
				26	Program:									
					<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata</b>	Persentase Sarana prasarana yang sesuai dengan standar kelas B	-	92,72%	100%	100%	100	90%		
				11	Kegiatan :									
					Pengadaan Peralatan Kedokteran	Jumlah Peralatan Kedokteran Yang Memadai	-	44 unit	43 Unit	43 Unit	97,6744186	16 unit, 2 set	16 unit, 2 set	109,09
						Jumlah Peralatan Kedokteran Yang Memadai (Refocusing)						17 unit, 1 paket	17 unit, 1 paket	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung Yang Memenuhi Persyaratan Rumah Sakit	-	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100	1 gedung	1 gedung	100
					Pengadaan kendaraan ambulance	Jumlah kendaraan tersedia	-	-	-	-	-	6 unit	6 unit	100
					<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur</b>	Persentase Sarana prasarana yang sesuai dengan standar kelas B	-	-	-	-	-			
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan mobil dinas	-	-	-	-	-	3 unit	3 unit	100
					Program :									
				36	<b>Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Slamet Garut.</b>	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan	-	70%	70%	90,17%	128,81	-	-	100
					Kegiatan :									
				1	Peningkatan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pemenuhan ruangan sesuai standar RS kelas B	-	65%	75%	0	0	-	-	0
						Persentasi alat-alat kedokteran sesuai standar RS kelas B	-	70%	80%	0	0	-	-	0
						Persentase jumlah gedung yang berkondisi baik	-	80%	90%	0	0	-	-	0
						Persentase peralatan kedokteran yang berkondisi baik	-	85%	84%	0	0	-	-	0

1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Persentasi pegawai yang melakukan diklat sesuai kompetensi	-	85%	95%	0	0	-	-	0	
							Persentasi kerja sama yang ditindak lanjuti	-	85%	95%	0	0	-	-	0	
							Jumlah dokumen dan produk hukum yang ditetapkan	-	20 buah	6 buah	0	0	-	-	0	
							Jumlah kegiatan publikasi dan promosi kesehatan	-	25 kegiatan	30 kegiatan	0	0	-	-	0	
							Jumlah layanan BLUD	-	-	-	-	-	23 layanan	-	100	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan</b>	100%	-	-	-	-	-	-	-	21,430
							<b>Penilaian SAKIP</b>	A	-	-	-	-	-	-	A	
							<b>Kualitas Tempat dan Pelayanan Rumah Sakit</b>		-	-	-	-	-	-		
							Bed Occupancy Rate (BOR)	66,80%	-	-	-	-	-	-		
							Turn Over Interval (TOI)	2 hari	-	-	-	-	-	-		
							Bed Turn Over (BTO)	56 kali	-	-	-	-	-	-		
							Average Length Of Stay(Avlos)	4 hari	-	-	-	-	-	-		
							Net Death Rate (NDR)	34 orang	-	-	-	-	-	-		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Gross Death Rate (GDR)	55 orang	-	-	-	-	-	-	
1	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu</b>	100%	-	-	-	-	-	-	21,43
1	02	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 berkas	-	-	-	-	-	-	21,43
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD</b>	100%	-	-	-	-	-	-	25
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	204 laporan	-	-	-	-	-	-	25
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B	100%	-	-	-	-	-	-	0
1	02	02	2.01		<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia	100%	-	-	-	-	-	-	0
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun	1 gedung	-	-	-	-	-	-	0
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	02	02	2.01	08		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang direhab	1 gedung	-	-	-	-	-	-	0
1	02	02	2.01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	30 unit 3 set 2 paket	-	-	-	-	-	-	0
1	2	3				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar</b>	100%	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	2.02			<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Insentif yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan standar</b>	100%	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	2.02	2		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kegiatan Pembayaran kepada pegawai sesuai dengan standar	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-

## **Realisasi Program / Kegiatan tahun 2021**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan hasil penilaian terhadap realisasi keuangan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, dalam upaya untuk mendukung sasaran program yang didefinisikan, menunjukkan bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian realisasi keuangan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan maret 2021 adalah sebesar Rp.8.396.873.050 atau sekitar (21,43%) sedangkan untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD BLUD Realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2021 sebesar Rp.16.415.141.06,

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sampai dengan Triwulan 1 belum ada Kegiatan yang terealisasi

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang bersumber dari laporan kegiatan, laporan keuangan dan rekam medik .

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegiatan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang.

Adapun pengukuran kinerja RSUD dr. Slamet Garut sampai dengan Maret 2021 tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit dr.Slamet Garut**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anali sis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
	<b>Tujuan</b>											
	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)			80%	92%	70 %	72%	91%	68%	70%	72%	
	<b>Indikator Sasaran</b>											
1	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit			75,51 poin	80 poin	82 poin	84 poin	77,67 poin	78,58 poin	82 poin	84 poin	
2	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai standar kelas B			0	70%	81,25 %	87,50 %	0	61%	81,25%	87,50 %	
3	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B			0	60%	75 %	80%	0	73,09 %	75%	80%	
4	Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel			0	100%	100 %	100%	0	100%	100%	100%	
	<b>Indikator Program</b>											
1	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan			0	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	
2	Penilaian SAKIP			0	0	A	A	0	A			
3	Kualitas tempat dan Pelayanan											
-	Bed Occupancy Rate (BOR)			-	-	66,8 %	70,40 %	0	-			
-	Turn Over Interval (TOI)			-	-	6,52 hari	2 hari	0	-			
-	Bed Turn Over (BTO)			-	-	58,46 kali	48 kali	0	-			
-	Average Lenhgt Of Stay(Avlos)			-	-	3,87 hari	6 hari	0	-			

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anali sis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
-	Net Death Rate (NDR)			-	-	67,08 Orang	26 orang	0	-			
-	Gross Death Rate (GDR)			-	-	98,35 Orang	46 orang	0	-			
4	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B					100%	100%	100%	100%			
	<b>Indikator Kegiatan</b>											
1	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2	Persentase pengadaan barang milik daerah rumah sakit yang tersedia			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
3	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
4	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia			-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	
5	Persentase Insentif yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan standar					100%						
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>											
	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN			-	-	14 berkas	14 berkas	-	-	14 berkas	14 berkas	
	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang tersedia				3 unit	0	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	
	Jumlah Pelayanan dan			-	-	204 laporan	204 laporan	-	-	204 laporan	204 laporan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anali sis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
	Penunjang Pelayanan BLUD						an					
	Jumlah gedung yang dibangun			2 gedun g	1 gedu ng	1 gedun g	2 gedun g	2 gedun g	1 gedun g	1 gedung	1 gdung	
	Jumlah gedung yang direhab			-	-	1 gedun g	1 gedun g	-	-	1 gedung	1 gedun g	
	jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia			43 unit	2 set, 33 unit 1 paket	30 unit , 3 set	115 unit	43 unit	2 set, 33 unit 1 paket	30 unit , 3 set	115 unit	
	Jumlah kegiatan Pembayaran kepada pegawai sesuai dengan standar					1 Tahu n						

dengan capaian indikatornya yaitu Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sampai dengan Bulan Maret 2021 terdapat 25 laporan dari target akhir tahun 2021 yaitu 204 laporan atau sekitar 25%

Dari tabel 2.2 bisa dilihat bahwa pencapaian kinerja rumah sakit dari tahun 2019 sampai dengan 2020 ada beberapa indikator yang mencapai target seperti SPM tahun 2019 dari target 80% dengan realisasi di tahun 2019 adalah 91% sedangkan capaian tahun 2020 SPM dari target 90% capaian hanya 68%.

## **2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD dr. Slamet Garut**

### **2.3.1 Situasi Perkembangan dan Persebaran COVID-19**

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada

awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19).

Terjadinya Corona Virus Disease atau COVID-19 telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 dan telah menyebar di berbagai negara di dunia dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Angka kejadian kasus COVID-19 di Kabupaten Garut sampai bulan Mei 2020, mencapai 17 orang terkonfirmasi positif, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 67 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 2613 orang, dan Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 956 orang. Sebaran kasus COVID-19 menurut kecamatan disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Data Sebaran Covid-19 di Kabupaten Garut Tahun 2020**

No	Kecamatan	Positif	PDP	ODP	OTG
1	Banjarwangi	0	0	25	6
2	Banyuresmi	1	7	66	10
3	Bayongbong	0	4	63	0
4	Balubur Limbangan	0	1	46	0
5	Bungbulang	0	0	4	0
6	Caringin	0	0	6	0
7	Cibalong	0	1	160	0
8	Cibatu	2	2	166	48
9	Cibiuk	0	0	105	0
10	Cigedug	1	3	21	91
11	Cihurip	0	0	1	0

No	Kecamatan	Positif	PDP	ODP	OTG
12	Cikajang	1	2	58	48
13	Cikelet	0	0	69	0
14	Cilawu	0	0	120	0
15	Cisewu	0	0	32	0
16	Cisompet	0	3	41	0
17	Cisurupan	0	1	54	139
18	Garut Kota	2	3	74	132
19	Kadungora	0	1	55	1
20	Karangpawitan	0	7	83	16
21	Karantengah	0	0	9	0
22	Kersamanah	0	3	91	0
23	Leles	0	2	80	0
24	Leuwigoong	1	0	49	0
25	Malangbong	0	4	131	0
26	Mekarmukti	0	0	30	0
27	Pakenjeng	0	0	24	0
28	Pameungpeuk	0	1	6	0
29	Pamulihan	0	2	71	0
30	Pangatikan	0	1	68	0
31	Pasirwangi	0	1	39	0
32	Peundeuy	0	0	48	0
33	Samarang	0	3	60	1
34	Selaawi	5	0	54	267
35	Singajaya	0	0	17	23
36	Sucinaraja	0	1	5	0
37	Sukaresmi	0	1	68	0
38	Sukawening	0	1	107	0
39	Talegong	0	1	30	0
40	Tarogong Kaler	3	4	123	52
41	Tarogong Kidul	0	4	144	65
42	Wanaraja	1	1	52	57
43	Tidak Diketahui	0	0	45	0
44	Luar Kota	0	2	11	0
45	WNA	0	0	2	0
	Jumlah	17	67	2613	956

Sumber : Pusat Informasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil analisis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut, Angka Reproduksi Efektif ( $R_t$ ) COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Garut sudah cukup baik, karena  $R_t < 1$ , namun *upper bound* masih relatif tinggi, karena datanya berfluktuasi dan kualitas data perlu dibenahi. Hasil analisis tersebut dengan pertimbangan *cut of point* penetapan masa pantau dan masa pengawasan secara rata-rata sebanyak 33 hari, asumsi sejak kasus pertama ditemukan (PDP) tanggal 4 Maret 2020, maka pasien ODP

dan PDP dinyatakan sehat apabila telah mengikuti protokol kesehatan minimal 33 hari yaitu tepatnya tanggal 22 April 2020 sebagai dasar analisa bahwa terdapat 2.565 pasien ODP, PDP dan konfirmasi. Pertimbangan lain analisa yaitu pola sebaran terbatas pada kasus yang dilaporkan mulai tanggal 22 April – 25 Mei 2020 (*cut of* 33 hari).

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan penyebaran yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan dan menetapkan kebijakan *social distancing* dan *lockdown*, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Beberapa langkah untuk tetap mewujudkan masyarakat produktif ditengah COVID-19 diantaranya dengan melakukan pendataan secara terintegrasi dengan memperbanyak pemeriksaan (Test COVID-19), melakukan pengendalian dan penerapan protokol COVID-19 dengan metode zonasi sampai tingkat desa, pengetatan penerapan protokol kesehatan dan reviu pelaksanaan protokol COVID-19 secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut 81 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) penuh.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bila melihat rasio jumlah penduduk masih tampak relatif tinggi bila dibandingkan dengan tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi antara RPJMD Kabupaten

Garut, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapat fokus sebagai permasalahan yang dihadapi sehingga dalam penetapan rencana kerja pembangunan ini akan tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata.

### **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan**

1. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Kurangnya percepatan perbaikan gizi dalam penanggulangan stunting;
3. Kurangnya Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Layanan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

### **2.3.3 Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020 Untuk Pelayanan Dasar Identifikasi Isu Strategis**

Permasalahan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 bidang pelayanan adalah belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan. Belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan antara lain tampak dari:

- a. masih kurangnya ketersediaan, distribusi, dan kompetensi tenaga kesehatan,
- b. masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat,
- c. Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan,
- d. adanya peningkatan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan malnutrisi,
- e. Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat,
- f. Belum seimbangnnya sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan preventif, dan
- g. Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi/terlayani.

### **2.3.4 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Adapun permasalahan utama urusan kesehatan adalah :

- a. Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan.
- b. Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas

- c. Masih adanya status gizi buruk dan stunting
- d. Masih adanya SPM Urusan Kesehatan yang belum mencapai target
- e. Masih rendahnya sumber daya kesehatan dan distribusinya belum merata, serta belum terstandarisasinya kompetensi tenaga kesehatan yang ada sesuai ANJAB dan ABK
- f. Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat.
- g. Belum optimalnya aspek regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- h. Belum optimalnya sistem rujukan pelayanan kesehatan
- i. Masih rendahnya akses dan kualitas air minum dan sanitasi yang layak, kualitas Sanitasi di Tempat-Tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) serta kualitas sanitasi dasar di lingkungan permukiman
- j. Belum optimalnya pengelolaan limbah medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik Pemerintah maupun Swasta

Dari permasalahan diatas apabila tidak di lakukan perbaikan kualitas pelayanan maka akan berdampak terhadap kinerja rumah sakit dan kinerja kabupaten dengan indikator Angka Harapan Hidup, tercatat Tahun 2020 sampai dengan bulan Mei Angka Kematian Bayi (IMR) bayi <1 tahun sejumlah 18 orang dari 2298 angka kelahiran yaitu sebesar 7,8 /1000 dan kematian Ibu akibat melahirkan tercatat 12 orang dari 2298 kelahiran sekitar 5,22/1000. Apabila dibandingkan dengan target SDGs (12 per 1000 KH) angka kematian neonatal di RSUD sampai saat ini sudah diatas target dan kematian ibu dibandingkan dengan target SDGs (70/100.000 KH) sebesar 0,00522 per 100.000 KH.

### **2.3.5 Tantangan dan Peluang**

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterlambatan pembayaran klaim dari mitra kerja (BPJS)
- b. Adanya perubahan-perubahan regulasi BPJS kesehatan yang menghambat pelayanan RSUD

- c. Adanya potensi peningkatan piutang pasien
- d. Masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan pasien BPJS
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat
- f. Ketidakseimbangan informasi di media terhadap pemberitaan RSUD

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan peraturan perundangan yang mendukung pelayan RSUD
- b. Adanya potensi pemanfaatan teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan RSUD
- c. Adanya koordinasi yang baik antara instansi horizontal
- d. Adanya standar pelayanan minimal yang konkret.

#### **2.3.6 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan . Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Identifikasi isu strategis Pembangunan Nasional dan isu strategis pembangunan daerah provinsi Jawa Barat dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Isu Strategis Pembangunan Nasional Dan Isu Strategis**  
**Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat**

<b>Isu Strategis RPJMN Tahun 2015-2019</b>	<b>Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023</b>
1) Pembangunan Manusia 2) Pembangunan Ekonomi 3) Pembangunan Kewilayahan 4) Pemabngunan Infrastruktur 5) Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan Pertahanan	1) Kualitas Nilai Kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial 3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5) Reformasi Birokrasi

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2010-2014, dan isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal

### **2.3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu strategis pada RSUD dr. Slamet Garut**

Dalam hal ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, maka pencapaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang pada tahun 2019 mencapai 78,83%, meningkat dari tahun 2018 sebesar 76,5%. Penataan ruang Kabupaten Garut bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang RTRW perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program dan juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis, yang tentu saja akan menjadi salah satu faktor daya saing daerah.

Tata Ruang Rumah Sakit dr. Slamet Garut adalah Meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan rujukan Badan layanan Umum Daerah

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bila melihat rasio jumlah penduduk masih tampak relatif tinggi bila dibandingkan dengan tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi antara RPJMD Kabupaten Garut dan visi, misi Dinas Kesehatan, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang

harus mendapat fokus sebagai permasalahan yang dihadapi sehingga dalam penetapan rencana kerja pembangunan ini akan tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata.

Dari hasil pelaksanaan evaluasi pembangunan Kabupaten Garut tahun 2020, permasalahan yang perlu diidentifikasi secara lebih cermat, selain mendasarkan diri pada evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan, juga perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendesak yang dihadapi dalam setiap urusan pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan yaitu :

1. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Kurangnya percepatan perbaikan gizi dalam penanggulangan stunting
3. Kurangnya Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Layanan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

**Tabel 2.5**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Garut**

**RSUD dr. Slamet Garut**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	RSUD dr.Slamet	<b>1. Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan</b>	100%	<b>220.097.935.928</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	RSUD dr.Slamet	<b>1. Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan</b>	100%	<b>220.097.935.928</b>	<b>208.788.226.835,00</b>
			<b>2. Penilaian SAKIP</b>	A				<b>2. Penilaian SAKIP</b>	A		
			<b>3. Kualitas Tempat dan Pelayanan Rumah Sakit</b>					<b>3. Kualitas Tempat dan Pelayanan Rumah Sakit</b>			
			- Bed Occupancy Rate (BOR)	68,60%				- Bed Occupancy Rate (BOR)	68,60%		
			- Turn Over Interval (TOI)	2 hari				- Turn Over Interval (TOI)	2 hari		
			- Bed Turn Over (BTO)	52 kali				- Bed Turn Over (BTO)	52 kali		
			- Average Lenhgt Of Stay(Avlos)	5 hari				- Average Lenhgt Of Stay(Avlos)	5 hari		
			- Net Death Rate (NDR)	30 orang				- Net Death Rate (NDR)	30 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Gross Death Rate (GDR)	51 orang				- Gross Death Rate (GDR)	51 orang		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	RSUD dr.Slamet	<b>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>46.467935.928</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	RSUD dr.Slamet	<b>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>46.467.935.928</b>	<b>46.467.935.928</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr.Slamet	Terpenuhinya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	46.467935.928	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr.Slamet	Terpenuhinya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 berkas	46.467935.928	46.467935.928
	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	RSUD dr.Slamet	Persentase pengadaan barang milik daerah rumah sakit yang tersedia	100 %	855.000.000						
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD dr.Slamet	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang tersedia	3 Unit	855.000.000						
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	RSUD dr.Slamet	<b>Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>172.775.000.000</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	RSUD dr.Slamet	<b>Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>172.775.000.000</b>	<b>172.775.000.000</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	204 Laporan	172.775.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	204 Laporan	172.775.000.000	172.775.000.000
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RSUD dr.Slamet	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B</b>	<b>100%</b>	<b>58.718.036.076</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RSUD dr.Slamet	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>29.886.959.708,00</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	RSUD dr.Slamet	<b>Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>58.718.036.076</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	RSUD dr.Slamet	<b>Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah gedung yang dibangun	2 gedung	24.178.588.850	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah gedung yang dibangun	1 gedung	10.000.000.000	10.000.000.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah gedung yang direhab	1 gedung	2.000.000.000						0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedia	1 set 242 unit	32.539.447.226						

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2022 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2022.
2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2022.
4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten Garut sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten.
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2022.
6. Kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, rumusan visi yaitu :

### **“ GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”**

**Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat

**Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

**Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019-2024, maka Renja Tahun 2022 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD dr. Slamet Tahun 2019-2024 dengan tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini serta prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil sesuai dengan misi pertama, tujuan, dan sasaran pembangunan Tahun 2022. Tujuan misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya luhur dengan sasaran Meningkatkan harapan hidup masyarakat. Guna mengukur pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, maka target indikator kinerja sasaran pembangunan tahun 2022 berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Garut dan Rencana Strategis Rumah Sakit Tahun 2019-2024 dengan melakukan pengkajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan dan dengan mempertimbangkan isu-isu penting dan prioritas program kegiatan dan dari Pusat sampai dengan daerah.

Untuk urusan kesehatan adalah terkait dengan misi kesatu yang bertujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, berdaya saing dan berbudaya luhur maka akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau diantaranya melalui

pengembangan layanan dan peningkatan sarana prasarana rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Usulan Prioritas Rumah Sakit dr Slamet Tahun 2019-2024 merupakan usulan dari pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Garut, sehingga terbentuk program dan kegiatan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis . Program dan Kegiatan Tahun 2022 adalah tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet. Usulan Program bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2022**

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA A</b>	<b>RSUD dr.SLAMET GARUT</b>	<b>1. Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan</b>	100%
			<b>2. Penilaian SAKIP</b>	A
			<b>3. Kualitas Tempat dan Pelayanan Rumah Sakit</b>	
			- Bed Occupancy Rate (BOR)	68,60%
			- Turn Over Interval (TOI)	2 hari
			- Bed Turn Over (BTO)	52 kali
			- Average Length Of Stay(Avlos)	5 hari
			- Net Death Rate (NDR)	30 orang
			- Gross Death Rate (GDR)	51 orang
1.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu</b>	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 berkas
1.2	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD</b>	100%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	204 laporan
2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B</b>	100%
2.1	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>		<b>Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia</b>	100 %
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah gedung yang dibangun	1 Gedung

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan RPJMN Bidang kesehatan 2019-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dengan Prioritas Nasional **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)**

Kebijakan strategis dari Prioritas Nasional (PN3) tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kebijakan diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security;
4. Peningkatan pemerataan layanan berkualitas;
5. Penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual;
6. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
7. Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif;
8. Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 dirumuskan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020, capaian

target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2022 mendasarkan dan memperhatikan:

Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2022.

1. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2022.
3. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten Garut sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten.
4. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2022.
5. Kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid 19

**Rumusan 12 (dua belas) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, yakni :**

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah; Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya.
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan;

11. Lingkungan Hidup; dan
12. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Garut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 – 2024 bidang kesehatan diantaranya yaitu dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau dengan

- a. Membangun 3 rumah sakit baru type pratama
- b. Pembinaan mental tenaga kesehatan yang professional
- c. Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas

Prioritas pembangunan kabupaten Garut tahun 2022 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga. Salah satu prioritas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut adalah dengan

- a. Pengembangan RSUD dr. Slamet Kelas B Pendidikan terakreditasi Paripurna
- b. Pengembangan layanan sub spesialis RSUD dr. Slamet
- c. Pengembangan sebagai pusat diagnostik

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut**

Tujuan dan sasaran dalam Renstra dilakukan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan menjadi Rencana Kerja setiap tahunnya

Tujuan dan sasaran Renstra tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Pencapaian Indikator kinerja kepala daerah selanjutnya menjadi indikator kinerja perangkat daerah..

Berdasarkan Tujuan dan sasaran Renstra Rumah Sakit dr. Slamet Garut tersebut maka dibuatlah Rencana Kerja Tahunan. Adapun tujuan dan sasaran RSUD dr Slamet Garut adalah 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran.

Untuk mencapai visi dan misi, maka dalam jangka pendek (2022). RSUD dr. Slamet Garut mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Garut.

Cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah salah satu caranya dengan kebijakan. Beberapa Kebijakan yang di ambil diantaranya adalah

- Meningkatkan ketersediaan alat kesehatan / kedokteran serta meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas sarana prasarana rumah sakit
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan dan penambahan tenaga kesehatan
- Meningkatkan pemenuhan SPM pelayanan rumah sakit dengan cara melakukan kerja sama dengan berbagai pihak
- Meningkatkan penyusunan dokumen perencanaan serta akuntabilitas laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu
- Meningkatkan sistem pengelolaan rumah sakit berbasis teknologi
- Perbaikan dan peningkatan standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
- Permohonan tambahan bantuan anggaran untuk kegiatan di Rumah Sakit dr.Slamet

### **3.2.1 Pencapaian Visi Misi Daerah**

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, rumusan visi yaitu :

***” Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut:

**Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

**Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelol.a segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

**Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang

berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Guna mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019-2024, maka RKPD Tahun 2022 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini serta prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD dr Slamet Garut dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2022.

### **3.2.2 Pencapaian SDGs**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Milenium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai dari tahun 2000-2015 .

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan SDGs di tahun 2016-2030 yang terkait dengan masalah kesehatan yaitu tujuan yang ketiga yaitu Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia.

Adapun Target dalam SDGs yang berhubungan dengan tugas fungsi rumah sakit diantaranya adalah

1. Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup
2. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 (kelahiran hidup) dan angka kematian balita 25 per 1000
3. Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan

4. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan visi misi kepala daerah, program nasional/internasional diantaranya adalah

- a. Masih kurangnya tenaga kesehatan dokter spesialis;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Belum optimalnya tata kelola Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan RSUD dr. Slamet Tahun 2022**

- a. Faktor- faktor rumusan program dan kegiatan

Urusan kesehatan adalah terkait dengan misi kesatu yang bertujuan Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit. Sasaran strategis RSUD dr Slamet merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan).

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya SKPD dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplematisasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan

tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet tahun 2022, maka program dan kegiatan yang akan ditempuh RSUD dr. Slamet Garut pada tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

**Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

**Kegiatan :**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**Kegiatan :**

Peningkatan Pelayanan BLUD

**Sub Kegiatan :**

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

**Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

**Kegiatan :**

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

**Sub Kegiatan :**

- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

**Kegiatan :**

- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

**Rencana Kegiatan Tahun 2022**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2022 berjumlah 3 program, 4 Kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 229.242.935.928,00** (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Tabel 3.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

## Pemerintah Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Slamet Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan( output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan : Wajib								
	Bidang Urusan :Kesehatan								
1	02	01							
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KO TA</b>	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	RSUD dr. Slamet	100%	<b>219.242.935.928</b>			100%	241.167.229.520
		Penilaian SAKIP		A				A	
		Kualitas Tempat dan Pelayanan Rumah Sakit - Bed Occupancy Rate (BOR)		68,60%				68,60%	
		- Turn Over Interval (TOI)		2 hari				2 hari	
		- Bed Turn Over (BTO)		52 kali				52 kali	
		- Average Lenhgt Of Stay(Avlos)		5 hari				5 hari	

Kode						Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							- Net Death Rate (NDR)		30 orang				30 orang	
							Gross Death Rate (GDR)		51 orang				51 orang	
1	02	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	RSUD dr. Slamet	100%	43.247.935.928	APBD		100%	47.572.729.520
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	RSUD dr. Slamet	14 berkas	43.247.935.928	APBD		14 berkas	47.572.729.520
1	02	01	2	10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	RSUD dr. Slamet	100%	172.775.000.000	BLUD		100%	190.052.500.000
1	02	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD dr. Slamet	204 laporan	172.775.000.000	BLUD		204 laporan	190.052.500.000
1	02	02				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana</b>	RSUD dr. Slamet	100%	<b>10.000.000.000</b>	BLUD		100%	11.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		<b>PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1	02	02	2	01		<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	RSUD dr. Slamet	100%	<b>10.000.000.000</b>	APBD		100%	11.000.000.000
1	02	02	2	01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun	RSUD dr. Slamet	1 Gedung	10.000.000.000	APBD		1 Gedung	11.000.000.000
1	2	3				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar	<b>RSUD dr. Slamet</b>	<b>100%</b>	3.220.000.000	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	3.542.000.000
1	2	3	2.	02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk</b>	<b>Persentase pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>RSUD dr. Slamet</b>	<b>100%</b>	3.220.000.000	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	3.542.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome ) / Kegiatan( output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<b>UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>sesuai standar</b>											
1	2	3	2. 02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan Pembayaran insentif non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	RSUD dr. Slamet	1 Tahun	3.220.000.000	DAU		1 Tahun	3.542.000.000
<b>Jumlah</b>									<b>229.242.935.928,00</b>				
									<b>“Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah”</b>				

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Slamet Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome ) / Kegiatan( output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan : Wajib								
	Bidang Urusan :Kesehatan								
1	02	01							
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA</b>	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	RSUD dr. Slamet	100%	<b>219.242.935.928</b>			100%	241.167.229.520
		Penilaian SAKIP		A				A	
		Kualitas Tempat dan Pelayanan Rumah Sakit - Bed Occupancy Rate (BOR)		68,60%				68,60%	
		- Turn Over Interval (TOI)		2 hari				2 hari	
		- Bed Turn Over (BTO)		52 kali				52 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		- Average Lenhgt Of Stay(Avlos)		5 hari				5 hari						
		- Net Death Rate (NDR)		30 orang				30 orang						
		Gross Death Rate (GDR)		51 orang				51 orang						
1	02	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	RSUD dr. Slamet	100%	43.247.935.928	APBD		100%	47.572.729.520
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	RSUD dr. Slamet	14 berkas	43.247.935.928	APBD		14 berkas	47.572.729.520
1	02	01	2	10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	RSUD dr. Slamet	100%	172.775.000.000	BLUD		100%	190.052.500.000
1	02	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang	RSUD dr. Slamet	204 laporan	172.775.000.000	BLUD		204 laporan	190.052.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		pelayanan BLUD												
1	02	02												
1	02	02												
1	02	02	2	01		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B</b>	RSUD dr. Slamet	100%	<b>10.000.000.000</b>	BLUD		100%	11.000.000.000
1	02	02	2	01		<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	RSUD dr. Slamet	100%	<b>10.000.000.000</b>	APBD		100%	11.000.000.000
1	02	02	2	01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun	RSUD dr. Slamet	1 Gedung	10.000.000.000	APBD		1 Gedung	11.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar	RSUD dr. Slamet	100%	3.220.000.000	DAU		100%	3.542.000.000
1	2	3	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	RSUD dr. Slamet	100%	3.220.000.000	DAU		100%	3.542.000.000
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan Pembayaran insentif non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	RSUD dr. Slamet	1 Tahun	3.220.000.000	DAU		1 Tahun	3.542.000.000
<b>Jumlah</b>									<b>229.242.935.928,00</b>				
									<b>“Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah”</b>				



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja ini merupakan suatu dokumen yang memuat kerangka kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Garut, yang berpedoman kepada RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh dan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022.

Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman yang disusun setiap tahun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Garut : "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera".

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Renja ini sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini terjadi kondisi dan peristiwa yang berada diluar kendali Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah disusun dapat ditinjau kembali dan mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**